

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi sektor publik keberadaannya bisa kita lihat disekitar kita seperti contohnya partai politik, instansi pemerintahan, sekolah-sekolah, rumah sakit, serta puskesmas, dimana mereka menyediakan jasa-jasa dan pelayanan bagi masyarakat, dimana mereka menyediakan pelayanan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. (Muh 2015).

Dengan melihat kepentingan serta kebutuhan masyarakat maka Pemerintah pusat memberikan otonomi daerah, dimana daerah punya wewenang khusus untuk mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah ialah bagian dari demokrasi dalam membentuk system dimana daerah punya wewenang khusus buat mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah ialah bagian dalam demokrasi dalam menciptakan sistem dimana sistem setiap pemerintahan dituntut kemandirian dalam manajemen di daerah. (Muh 2015)

Sistem akuntansi pemerintah menggunakan peraturan Menteri Keuangan pada tingkat pemerintahan diatur dalam PMK No.59/PMK.06/2005 perihal Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan pusat serta menurut Pemandagri No.59 Tahun 2007 perihal Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah yang memakai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Oleh sebab itu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan serta penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ialah salah satu syarat serta pedoman bagi pemerintah untuk bisa membuat kaporan keuangan yang berkualitas.

Akuntansi ialah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi serta peristiwa keuangan serta hasilnya tersaji dalam bentuk laporan (PP Nomor 24 Tahun 2005). Buat mewujudkan hal tersebut dibutuhkan suatu pemikiran melalui suatu penemuan sistem akuntansi (Indra 2007)

Sistem akuntansi pemerintah di tingkat pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No.59/PMK.06/2005 perihal sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat serta berdasarkan Permendagri No.59 Tahun 2007 perihal Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah yang memakai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Oleh sebab itu penerapan standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ialah salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2003 perihal Keuangan Negara, akuntansi keuangan daerah harus bisa diwujudkan dengan pengembangan sistem yang sudah ada. Selain itu Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 perihal Panduan Pengelolaan Keuangan daerah pula meminta pemerintah buat mewujudkan keuangan yang berbasis teknologi melalui sistem yang sudah dikembangkan secara andal.

Selama ini pelaporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Kurangnya isu yang dihasilkan menyebabkan pemerintah tidak memiliki manajerial yang baik serta tidak mampu mewujudkan akuntabilitas yang sesuai dengan harapan rakyat, sebab pengelolaan keuangan

Pemda masih menggunakan sistem akuntansi yang mengacu pada tata buku secara manual, sehingga informasi yang didapatkan tidak bisa mewujudkan keakuratan karena penerapan manual administrasi keuangan daerah sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan daerah. (Nanda Rakhmata Sari, 2012)

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang lemah akan mengakibatkan pengendalian intern yang lemah serta pada akhirnya laporan keuangan yang didapatkan tidak andal dan tidak relevan buat pembuatan keputusan. Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah mencakup validitas; yaitu informasi yang didapatkan pada sistem akuntansi yang dipergunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi. Reliabilitas; yaitu informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi yang digunakan anggota organisasi bisa menghemat penggunaan biaya sebab informasi yang didapatkan dapat dipercaya serta efisien. (Nanda Rakhmata Sari, 2012)

Faktor keorganisasian seperti pelatihan, serta dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Akibat ini mengidentifikasi bahwa implementasi sistem akuntansi keuangan daerah bisa memperlancar pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan mendukung adanya implementasi sistem akuntansi implementasi sistem yang baru. Salah satu faktor yang memengaruhi sistem akuntansi keuangan daerah adalah pelatihan. Pelatihan ialah suatu proses yang diberikan pada aparatur pemerintah untuk menelaah .mengetahui ,melaksanakan proses yang sudah ditetapkan dalam implementasi suatu sistem. (Nanda Rakhmata Sari, 2012)

Faktor lainnya yang mempengaruhi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah ialah dukungan atasan. Dukungan atasan diartikan menjadi keterlibatan manajer dalam kemajuan organisasi, dalam hal ini ialah pihak pemerintah yang mencapai visi serta misi pemerintahannya. Dukungan atasan ialah menyediakan sumber daya yang diharapkan, serta juga bisa diartikan menjadi bantuan yang diberikan oleh pimpinan yang lebih tinggi pada bawahan. Oleh sebab itu dukungan atasan memberikan hal yang positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah sehingga info yang didapatkan melalui sistem akuntansi keuangan daerah menjadi transparan dan mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. (Nanda Rakhmata Sari 2017)

Konflik kognitif serta afektif yang mempengaruhi lingkungan didalam organisasi bisa mempengaruhi jalannya implementasi sistem akuntansi keuangan daerah yang pada akhirnya akan mempengaruhi kegunaan sistem tadi. Konflik kognitif bisa berguna bagi individu tertentu untuk memecahkan persoalan serta mendorong kearah perbaikan, apabila individu tersebut yang dipengaruhi faktor sikap organisasinya memiliki potensi untuk mempertahankan argumen dalam organisasi (Chenhall, 2004). Sedangkan konflik afektif melibatkan persepsi yang mengancam posisi seorang didalam suatu kelompok, konfrontasi, putus harapan antara pribadi seseorang menggunakan nilai norma yang ada (Chenhall, 2004)

Variabel konflik kognitif diteliti buat memaksimalkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, serta variabel konflik afektif diteliti buat diminimalkan dalam kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Secara teoritis

variabel ini dijadikan variabel intervening yang secara tidak eksklusif mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen.

Adapun dibawah ini riset penelitian tentang kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah yang mempunyai pendapat berbeda seperti penelitian yang dilakukan oleh (Nurlaela and Rahmawati 2010) yang meneliti dampak faktor berperilaku organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan variabel dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan yang menghasilkan bahwa masing-masing variabel ada yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Variabel yang mempengaruhi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah adalah dukungan atasan. Variabel lainnya berupa kejelasan tujuan dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Selain itu variabel konflik kognitif dan konflik afektif yang dijadikan variabel intervening yang menyampaikan pengaruh terhadap variabel dependennya.

Azlina (2012) yang menyatakan bahwa variabel kejelasan tujuan serta dukungan atasan mempunyai dampak signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. (Nurul Ardiani, Rmrinaldi Nur DP 2012). Penelitian (Yulistia, Yanti, and Purwasih 2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Tetapi pada penelitian (Mranani and Lestiorini, 2011) yang meneliti perihal faktor berperilaku organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan konflik afektif serta konflik kognitif menjadi variabel intervening. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pelatihan, kejelasan tujuan,

dukungan atasan, dan konflik afektif tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan SKAD. (Aziz 2019) hasil penelitian menggambarkan bahwa variabel dukungan atasan serta variabel pelatihan tidak berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian (Izzah, Menne, and Mane 2018) hasil penelitian menggambarkan bahwa variabel pelatihan dan variabel dukungan tidak berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. (Yulistia, Yanti, and Purwasih 2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kejelasan tujuan tidak berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, research gap yang peneliti tuangkan pada penelitian ini yaitu masih terjadinya ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang menjadikan penelitian ini masih menarik buat diteliti balik, serta pengelolaan keuangan dan barang di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura selalu mendapat catatan atau koreksi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua. (sumber, jubi co.id (2020).

Bastari (2004) mengemukakan sistem lama (MAKUDA) menggunakan ciri-ciri antara lain single entry (pembukuan tunggal), incremental budgeting (penganggaran secara tradisional yang rutin dan pembangunan) serta pendekatan anggaran berimbang dinamis sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan daerah, karena beberapa alasan yaitu tidak mampu menyampaikan informasi tentang kekayaan yang dimiliki oleh daerah ,atau dengan kata lain dapat memberikan informasi tentang laporan neraca, tidak bisa menyampaikan informasi mengenai laporan aliran kas sebagai akibatnya manajemen atau public tidak dapat

mengetahui faktor apa saja yang mengakibatkan adanya kenaikan atau penurunan kas daerah, sistem yang lama (MAKUDA) ini pula tidak bis membantu daerah buat menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berbasis kinerja sinkron dengan ketentuan PP No. 105 tahun 2000, dan PP No.108 tahun 2000. Di waktu ini sudah banyak jenis sistem baru yang dipergunakan pemerintah buat mengatur keuangan daerah seperti SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah, SIMBADA (Sistem Informasi Barang Milik Daerah)

Penelitian yang dilakukan Nurkhamid (2008) perihal implementasi penemuan sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh negative terhadap keterbatasan sistem informasi dan berpengaruh positif terhadap komitmen manajemen, pelatihan, budaya organisasi, serta pengembangan sistem pengukuran kinerja, namun kesulitan menentukan ukuran kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. (Muh 2015)

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nanda Rakhmata Sari (2017). Dari analisis serta dan pengujian hipotesis, variabel yang dipergunakan pada penelitian tersebut adalah Pelatihan, Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan, Konflik Kognitif Afektif, dan Kegunaan SAKD. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada tahun dan lokasi penelitian, dan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel kejelasan tujuan.

Berdasarkan perspektif di atas, maka sudah keharusan bagi pemerintah Kota Jayapura untuk meningkatkan keperilakuan organisasi dan efektifitas pengelolaan

sistem akuntansi keuangan daerahnya. Bila keperilakuan organisasi dan pengelolaan sistem akuntansi keuangan daerahnya tidak efektif akan mengakibatkan aplikasi pembangunan daerah tidak optimal. Sesuai kondisi tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini sebab masih Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menunjukkan secara empiris **“Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik Kognitif dan Konflik Afektif sebagai Intervening”**(Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Jayapura).

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini merupakan rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis yang ingin coba dipecahkan untuk mendapatkan jawabanya dari penelitian ini :

1. Apakah faktor organisasional seperti dukungan atasan akan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
2. Apakah faktor organisasional seperti pelatihan akan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
3. Apakah faktor organisasional seperti dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan konflik afektif sebagai variabel intervening?
4. Apakah faktor organisasional seperti pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan konflik kognitif sebagai intervening?

5. Apakah konflik kognitif berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
6. Apakah konflik afektif berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh faktor organisasional seperti dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Untuk menguji pengaruh faktor organisasional seperti pelatihan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi daerah.
3. Untuk menguji pengaruh faktor organisasional seperti dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan konflik afektif sebagai variabel intervening.
4. Untuk menguji pengaruh faktor organisasional seperti pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan konflik kognitif sebagai variabel intervening.
5. Untuk menguji pengaruh konflik kognitif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
6. Untuk menguji pengaruh konflik afektif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini sebagai penulis berharap penelitian ini bisa berguna bagi banyak orang khususnya :

1. Bagi Pemda hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan masukan bagi organisasi khususnya Pemerintah Daerah Kota Jayapura supaya memperhatikan faktor-faktor perilaku pada implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah guna meningkatkan kegunaan sistem yang terdapat pada pemerintah daerah tersebut.
2. Bagi para akademisi ,hasil penelitian ini bisa diharapkan sebagai bahan informasi dan referensi untuk penelitian yang akan datang, menggunakan menambah beberapa faktor –faktor lain yang dinilai perlu kedalam contoh penelitian yang terkait dengan akuntansi keperilakuan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang melandasi suatu penelitian, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang sumber data dan metode pengumpulan data , populasi dan sampel, definisi dan pengukuran variabel, metode analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian, hasil uji, dan analisis data serta pembahasannya

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang Kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari peneliti